



Merrespons Hoaks dan Disinformasi: Literasi Digital sebagai Bagian dari Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Najamudin^{1*}, Dwi Muliati², Anggun Duwi Wahyu Ziliwu³, Feti Oktaviani⁴,
Mutiara Al-Nizar⁵

¹⁻⁵Fakultas Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Email: najamudin@uika.ac.id^{1*}, dwimuliati14@gmail.com², anggundw78@gmail.com³,
fetioktaviani10@gmail.com⁴, alnzrmutiara@gmail.com⁵

*Korespondensi Penulis

Abstract. *The rapid spread of hoaxes and disinformation in the digital era poses serious challenges to social cohesion, societal stability, and the internalization of moral values, particularly within Muslim communities. The circulation of unverified information has the potential to trigger conflict, polarization, and a decline in public trust. This study aims to explore digital literacy as an ethical and religious instrument in actualizing the Islamic principle of amar ma'ruf nahi munkar in the contemporary digital sphere. Employing a qualitative library research approach, the study examines classical Islamic sources, including the Qur'an and Hadith, alongside contemporary literature on digital communication ethics and digital citizenship. The findings indicate that digital literacy from an Islamic perspective extends beyond technical competence in accessing and disseminating information; it represents a form of moral responsibility (amanah) grounded in honesty (ash-shidq), prudence, and accountability. Practices such as information verification (tabayyun), clarification, and corrective engagement in online spaces are concrete expressions of amar ma'ruf nahi munkar. Strengthening ethically grounded digital literacy is therefore essential for fostering a healthy, just, and civilized digital public sphere.*

Keywords: Digital Literacy; Disinformation; Enjoining Good; Forbidding Wrong; Hoax

Abstrak. Peredaran hoaks dan disinformasi yang semakin cepat di era digital menimbulkan tantangan serius terhadap kohesi sosial, stabilitas masyarakat, dan internalisasi nilai-nilai moral, khususnya dalam komunitas Muslim. Arus informasi yang tidak terverifikasi berpotensi memicu konflik, polarisasi, serta melemahkan kepercayaan publik. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi literasi digital sebagai instrumen etis dan religius dalam mengaktualisasikan prinsip amar ma'ruf nahi munkar di ruang siber kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan menelaah sumber-sumber klasik Islam, seperti Al-Qur'an dan hadis, serta literatur kontemporer mengenai etika komunikasi digital dan kewargaan digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa literasi digital dalam perspektif Islam tidak hanya mencakup kemampuan teknis mengakses dan menyebarkan informasi, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral (amanah) yang berlandaskan nilai kejujuran (ash-shidq), kehati-hatian, dan akuntabilitas. Praktik tabayyun (verifikasi informasi), klarifikasi, dan keterlibatan korektif di ruang daring dipahami sebagai manifestasi konkret amar ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian, penguatan literasi digital berbasis etika Islam menjadi strategi penting dalam membangun ruang publik digital yang sehat, adil, dan beradab.

Kata Kunci: Disinformasi; Hoaks; Literasi Digital; Melarang Keburukan; Menganjurkan Kebajikan

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membentuk lanskap baru dalam produksi, distribusi, dan konsumsi informasi di masyarakat. Media digital, khususnya media sosial dan aplikasi pesan instan, menjadi ruang utama pertukaran wacana publik yang berlangsung cepat, masif, dan nyaris tanpa batas. Kondisi ini tidak hanya mempermudah akses informasi, tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap hoaks dan disinformasi. Bennett dan Livingston (2021) menyebut fenomena ini sebagai disinformation order, yakni situasi ketika penyebaran informasi salah telah terintegrasi dalam ekosistem media modern, bahkan “deeply

embedded in the contemporary media ecosystem” (Bennett & Livingston, 2021, p. 122). Selain itu, struktur algoritmik platform digital turut mempercepat penyebaran konten menyesatkan karena sistem dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna, sehingga “false information spreads not simply because it exists, but because platform structures amplify it” (Freelon & Wells, 2022, p. 150). Faktor literasi digital juga berperan penting, karena individu dengan kemampuan literasi media yang lebih baik terbukti lebih mampu membedakan informasi benar dan salah; “digital media literacy significantly reduces susceptibility to misinformation” (Guess et al., 2023, p. 8). Di sisi lain, insentif ekonomi dalam model bisnis berbasis perhatian (attention economy) sering kali tidak selaras dengan kualitas epistemik informasi, sehingga “platform incentives are often misaligned with epistemic quality” (Kozyreva et al., 2022, p. 3). Bahkan secara global, misinformasi dan disinformasi kini diidentifikasi sebagai salah satu risiko paling serius dalam jangka pendek, di mana “misinformation and disinformation remain the most severe short-term global risks” (World Economic Forum, 2024, p. 11).

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa percepatan arus informasi di ruang digital sering kali tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam melakukan verifikasi dan evaluasi kritis terhadap konten yang diterima. Informasi yang beredar luas tidak selalu melalui mekanisme penyuntingan atau pertanggungjawaban akademik, sehingga kebenaran faktual kerap dikalahkan oleh kecepatan dan sensasi. Dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia, situasi ini berpotensi memicu polarisasi sosial, konflik identitas, serta degradasi etika komunikasi di ruang publik.

Fenomena hoaks berbasis agama, politik, dan sosial menjadi tantangan serius karena mampu mempengaruhi persepsi kolektif masyarakat secara sistematis. Paparan informasi yang berulang, meskipun tidak akurat, dapat membentuk konstruksi kognitif baru yang diterima sebagai kebenaran. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya merusak rasionalitas publik, tetapi juga melemahkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial yang seharusnya menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat.

Dalam perspektif Islam, penyebaran informasi bukanlah aktivitas netral, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Konsep tabayyun menegaskan kewajiban verifikasi sebelum menerima dan menyebarkan informasi, terutama ketika sumbernya tidak jelas atau berpotensi menimbulkan mudarat. Prinsip ini selaras dengan ajaran amar ma'ruf nahi munkar yang menempatkan umat Islam sebagai agen kebaikan dan penjaga moralitas sosial, termasuk di ruang digital. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa praktik bermedia umat Islam belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut. Rendahnya literasi digital menyebabkan

sebagian masyarakat menjadi korban sekaligus pelaku penyebaran hoaks. Oleh karena itu, literasi digital tidak cukup dipahami sebagai keterampilan teknis semata, tetapi harus dimaknai sebagai kecakapan etis dan akhlak sosial dalam merespons informasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji literasi digital sebagai instrumen strategis dalam implementasi nilai amar ma'ruf nahi munkar di era digital. Dengan mengintegrasikan perspektif literasi media dan etika komunikasi Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam membangun kesadaran digital yang berlandaskan akhlakul karimah serta relevan dengan tantangan kontemporer.

2. KAJIAN LITERATUR

Transformasi digital telah menggeser pola dakwah dan komunikasi keagamaan dari ruang fisik menuju ruang virtual yang lebih terbuka dan partisipatif. Dalam masyarakat jaringan (*network society*), otoritas keagamaan tidak lagi dimonopoli oleh institusi formal, melainkan juga dibentuk oleh aktor-aktor digital seperti pendakwah media sosial dan influencer Muslim. Perubahan ini membuka peluang dakwah yang luas, namun sekaligus menghadirkan tantangan serius terkait validitas pesan dan otoritas keilmuan.

Ruang digital juga menjadi medan subur bagi penyebaran hoaks dan disinformasi yang dibungkus dengan narasi keagamaan. Rendahnya literasi digital audiens menyebabkan konten bermuatan manipulatif mudah diterima tanpa proses verifikasi sanad keilmuan maupun konteks normatifnya. Situasi ini berpotensi melahirkan pemahaman keagamaan yang dangkal, eksklusif, bahkan intoleran.

Dalam kerangka etika komunikasi Islam, Al-Qur'an memberikan panduan normatif yang kuat melalui QS. An-Nahl [16]: 125 yang menekankan tiga prinsip utama dakwah, yaitu *bi al-hikmah, mau'idzah hasanah, dan mujadalah bi al-lati hiya ahsan*. Prinsip-prinsip ini menuntut pendakwah dan pengguna media digital untuk menyampaikan pesan kebenaran secara bijaksana, santun, dan argumentatif, bukan provokatif.

Selain itu, konsep *qaulan sadidan* dan *qaulan layyinan* menjadi landasan etis dalam komunikasi digital. *Qaulan sadidan* menekankan kejujuran dan validitas informasi melalui proses *tabayyun*, sementara *qaulan layyinan* mengajarkan kelembutan bahasa demi menjaga harmoni sosial. Kedua prinsip ini relevan dalam merespons dinamika media sosial yang kerap diwarnai ujaran kebencian dan polarisasi opini.

Dengan demikian, kajian literatur ini menegaskan bahwa literasi digital dalam perspektif Islam harus dipahami sebagai integrasi antara kecakapan kognitif, tanggung jawab moral, dan kesadaran teologis. Literasi digital bukan hanya alat proteksi dari hoaks, tetapi juga sarana

strategis dalam menjalankan misi *amar ma'ruf nahi munkar* secara kontekstual di era informasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk mengeksplorasi integrasi nilai-nilai Islam dalam kecakapan digital. Fokus utama penelitian terletak pada penelaahan mendalam terhadap berbagai literatur yang relevan, mencakup teks keagamaan (Al-Qur'an dan Hadis) mengenai etika komunikasi, buku teks sosiologi media, serta jurnal ilmiah yang membahas literasi digital dan konsep *amar ma'ruf nahi munkar*. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dari sumber-sumber otoritatif, baik cetak maupun digital, guna membangun landasan teoretis yang kuat mengenai tanggung jawab moral seorang Muslim dalam menghadapi arus informasi di ruang siber.

Proses analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (*content analysis*) dan interpretasi logis untuk menghubungkan prinsip-prinsip normatif Islam dengan fenomena empiris penyebaran hoaks dan disinformasi. Peneliti melakukan reduksi data, penyajian data secara sistematis, dan penarikan kesimpulan dengan mengontekstualisasikan kewajiban *tabayyun* (verifikasi) sebagai instrumen filtrasi informasi modern. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan menghasilkan sintesis baru yang memposisikan literasi digital bukan sekadar keterampilan teknis, melainkan sebagai bentuk manifestasi akhlak sosial dalam menjaga keutuhan informasi di era digital.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penyebaran Hoaks dan Disinformasi

Anatomi Krisis Informasi di Ruang Digital Penyebaran hoaks dan disinformasi di era digital telah bertransformasi dari sekadar rumor sederhana menjadi ancaman sistemik yang mampu mengoyak kohesi sosial. Di Indonesia, fenomena ini diperparah oleh penetrasi internet yang tinggi namun tidak dibarengi dengan kematangan budaya literasi. Melalui platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan TikTok, informasi palsu dapat menyebar secara eksponensial dalam hitungan detik. Kecepatan transmisi ini sering kali melampaui kemampuan individu maupun otoritas terkait untuk melakukan verifikasi atau klarifikasi.

Berdasarkan studi kepustakaan yang dilakukan, analisis kami menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor fundamental yang menggerakkan roda penyebaran hoaks di tengah masyarakat:

Kesenjangan Literasi Digital dan Bias Kognitif

Faktor utama yang menjadi akar permasalahan adalah rendahnya tingkat literasi digital di berbagai lapisan masyarakat. Literasi digital bukan hanya soal kemampuan teknis mengoperasikan gawai, melainkan kemampuan kognitif dalam mengevaluasi validitas sebuah informasi. Banyak pengguna internet terjebak dalam apa yang disebut sebagai *confirmation bias* (bias konfirmasi), yaitu kecenderungan psikologis untuk mencari, menafsirkan, dan mempercayai informasi yang hanya mendukung pandangan, keyakinan, atau prasangka yang sudah mereka miliki sebelumnya.

Dalam kondisi ini, kebenaran objektif menjadi tidak relevan. Sebuah hoaks yang mendukung kebencian terhadap kelompok tertentu atau memuji kelompok sendiri akan dianggap sebagai kebenaran mutlak tanpa melalui proses *check and re-check*. Selain itu, masyarakat sering kali mengalami *information overload* (banjir informasi), di mana otak manusia cenderung mengambil jalan pintas mental dengan mempercayai informasi yang paling sering muncul di beranda mereka atau yang dibagikan oleh lingkaran terdekat (keluarga dan teman), terlepas dari akurasi sumbernya.

Arsitektur Algoritma Media Sosial dan Ruang Gema (Echo Chambers)

Secara teknis, platform media sosial berperan besar dalam memperkuat penyebaran disinformasi melalui desain algoritmanya. Algoritma modern dirancang dengan tujuan utama memaksimalkan *user engagement* (keterlibatan pengguna). Platform akan memprioritaskan konten yang memicu reaksi emosional yang kuat seperti amarah, ketakutan, atau antusiasme berlebih karena konten jenis inilah yang paling banyak mendapatkan *like, share*, dan komentar.

Sayangnya, informasi hoaks dan disinformasi sengaja dirancang secara bombastis untuk memicu emosi tersebut. Akibatnya, sistem algoritma secara otomatis melipatgandakan jangkauan konten negatif ini dibandingkan konten edukatif yang cenderung datar. Hal ini menciptakan fenomena *Echo Chambers* (ruang gema), di mana pengguna hanya terpapar pada opini yang seragam dan terisolasi dari sudut pandang yang berbeda. Dalam ruang gema ini, hoaks tidak hanya tumbuh subur tetapi juga terverifikasi secara sosial oleh sesama anggota kelompok yang memiliki pemikiran serupa, sehingga menciptakan persepsi kolektif yang salah.

Komodifikasi Informasi: Motivasi Ekonomi dan Politik

Hoaks di era kontemporer bukan lagi sekadar keisengan individu, melainkan telah menjadi komoditas yang diorganisir secara profesional. Terdapat dua motif utama di balik produksi disinformasi secara massal:

- a) Motivasi Ekonomi: Dalam ekosistem ekonomi digital, trafik atau kunjungan ke sebuah situs web adalah uang. Melalui skema *AdSense*, pemilik situs yang menyebarkan berita bohong dengan judul *clickbait* (umpan klik) dapat meraup keuntungan finansial besar dari iklan yang tayang. Semakin kontroversial berita tersebut, semakin banyak klik yang didapat, dan semakin besar pundi-pundi ekonomi yang dihasilkan. Dalam konteks ini, kebenaran dikorbankan demi profitabilitas.
- b) Motivasi Politik: Disinformasi sering kali digunakan sebagai senjata dalam "perang saraf" atau propaganda politik. Penggunaan *buzzer* (pendengung) politik dan akun-akun bot otomatis menjadi lazim untuk memanipulasi opini publik. Strategi ini bertujuan untuk mendelegitimasi lawan politik, menciptakan kegaduhan, hingga mempolarisasi pemilih. Dengan menggunakan teknik narasi yang manipulatif, aktor politik dapat menggiring massa untuk mempercayai narasi palsu yang menguntungkan posisi mereka, yang pada akhirnya merusak integritas demokrasi dan nilai-nilai kejujuran dalam berbangsa.

Penghancuran kebenaran melalui hoaks ini secara teologis bertentangan dengan prinsip *ash-shidiq* (kebenaran) dalam Islam. Penyebaran informasi tanpa verifikasi bukan hanya kesalahan teknis, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap amanah ilmiah dan moral yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu di ruang publik digital.

Literasi Digital sebagai Solusi: Transformasi Paradigma di Era Disinformasi

Literasi digital bukan sekadar kemahiran teknis dalam mengoperasikan perangkat keras atau perangkat lunak, melainkan sebuah kompetensi kognitif dan sosial yang memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan informasi secara bijak. Gilster (1997) dalam Bawden (2008) mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format dari berbagai sumber ketika disajikan melalui komputer. Dalam lanskap media sosial yang penuh dengan polusi informasi, literasi digital berfungsi sebagai "imunisasi intelektual" yang melindungi pengguna dari paparan konten destruktif.

Pentingnya literasi digital sebagai solusi fundamental dalam merespons ancaman hoaks dan disinformasi dapat dijabarkan melalui tiga pilar transformasi berikut:

Transformasi Kesadaran: Membangun Kewaspadaan Digital (Digital Vigilance)

Langkah pertama dalam literasi digital adalah meningkatkan kesadaran (*awareness*) terhadap ekosistem informasi yang tidak netral. Pengguna yang memiliki literasi tinggi memahami bahwa ruang digital adalah medan kontestasi kepentingan, di mana informasi sering kali dimanipulasi untuk tujuan tertentu. Literasi digital mengubah perilaku konsumsi informasi dari "penerima pasif" menjadi "pengguna waspada".

Masyarakat diajarkan untuk tidak langsung bereaksi secara emosional terhadap informasi yang mengejutkan atau provokatif. Kesadaran ini mencakup pemahaman tentang konsekuensi hukum dan moral dari setiap aktivitas berbagi (*sharing*). Dalam perspektif Islam, kesadaran ini sejalan dengan prinsip kewaspadaan terhadap berita yang dibawa oleh orang fasik, sebagaimana diingatkan dalam Al-Qur'an agar tidak menimpakan bahaya kepada suatu kaum karena kecerobohan informasi. Dengan literasi digital, individu menjadi lebih berhati-hati dalam menekan tombol *share*, menyadari bahwa jempol mereka adalah representasi dari tanggung jawab moral mereka.

Transformasi Keterampilan Analitis: Mekanisme Verifikasi dan Evaluasi Kritis

Literasi digital membekali masyarakat dengan perangkat metodologis untuk membedah informasi. Keterampilan analitis ini merupakan jantung dari solusi atas disinformasi. Proses evaluasi kritis mencakup beberapa langkah teknis dan kognitif:

- a) Verifikasi Sumber: Memeriksa apakah media atau individu yang menyebarkan informasi memiliki kredibilitas dan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b) Triangulasi Data: Membandingkan klaim informasi dari satu sumber dengan sumber otoritatif lainnya untuk menemukan konsistensi fakta.
- c) Identifikasi Bias dan Framing: Kemampuan untuk mengenali apakah sebuah berita disusun dengan sudut pandang yang berat sebelah atau menggunakan bahasa yang bertujuan menggiring opini publik secara paksa.

Keterampilan ini melatih otak untuk bekerja secara sistematis melalui proses *tabayyun* digital. Individu tidak lagi hanya melihat permukaan teks, tetapi mampu menganalisis konteks, motif di balik penulisan, hingga keaslian data visual (seperti mendeteksi foto atau video hasil manipulasi/AI).

Transformasi Partisipasi: Agen Perubahan di Ruang Siber

Solusi jangka panjang terhadap hoaks tidak hanya berhenti pada pembersihan diri sendiri, tetapi juga keterlibatan aktif dalam menjaga kesehatan ekosistem digital. Literasi digital mendorong masyarakat untuk mengambil peran sebagai "pembasmi hoaks" (*hoax buster*) di lingkaran sosial mereka masing-masing. Partisipasi aktif ini termanifestasi dalam beberapa tindakan nyata:

- a) Klarifikasi dan Edukasi: Memberikan koreksi yang santun ketika menemukan informasi salah di grup percakapan keluarga atau komunitas tanpa mempermalukan pengirimnya.

- b) Pelaporan Konten (Flagging): Menggunakan fitur pelaporan pada platform media sosial untuk menandai konten yang mengandung ujaran kebencian, disinformasi, atau penipuan agar segera ditindaklanjuti oleh penyedia layanan.
- c) Produksi Konten Positif: Mengimbangi narasi negatif dengan menyebarkan informasi yang benar, mencerahkan, dan membawa kemaslahatan (amar ma'ruf).

Dengan demikian, literasi digital menciptakan sebuah gerakan kolektif di mana setiap individu merasa memiliki tanggung jawab sosial untuk memutus rantai penyebaran fitnah. Ruang digital yang bersih hanya dapat terwujud apabila mayoritas penggunaannya bukan lagi menjadi korban algoritma, melainkan menjadi subjek yang berdaulat atas informasi yang mereka konsumsi dan distribusikan.

Tantangan Era Post-Truth: Disinformasi dan Krisis Akhlak Digital

Era *post-truth* atau pascakebenaran telah mengubah peta sosiokultural masyarakat modern secara fundamental. Pada era ini, keyakinan personal dan daya tarik emosional jauh lebih berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan fakta-fakta objektif yang bersifat empiris. Fenomena ini menciptakan paradoks informasi: di satu sisi manusia memiliki akses tak terbatas terhadap pengetahuan, namun di sisi lain, mereka terjebak dalam pusaran disinformasi yang menyesatkan. Teknologi digital, melalui mekanisme algoritma media sosial yang eksploitatif, telah mempercepat sirkulasi narasi tanpa verifikasi, yang secara langsung menargetkan emosi dasar manusia seperti ketakutan, kemarahan, dan kebencian.

Kerentanan Generasi Muda dan Manipulasi Kognitif

Generasi muda, sebagai *digital natives*, merupakan kelompok yang paling terpapar sekaligus paling rentan terhadap distorsi informasi ini. Menurut Syihabudin & Rahman (2024), kerentanan ini bukan disebabkan oleh ketidakmampuan teknis, melainkan oleh kurangnya "filter mental" dalam menghadapi propaganda dan misinformasi yang dikemas secara estetik dan persuasif. Ruang virtual sering kali menjadi medan tempur ideologi di mana kebenaran dikonstruksi secara manipulatif. Hal ini tidak hanya merusak daya nalar kritis mereka, tetapi juga membentuk pola pikir yang reaktif dan intoleran terhadap perbedaan pandangan.

Spektrum Ancaman Digital dalam Aktivitas Dakwah

Dunia dakwah pun tak luput dari tantangan ini. Aktivitas syiar agama di ruang virtual kini berhadapan dengan realitas ancaman yang bersifat multidimensi. Rustandi (2023) mencatat bahwa ancaman tersebut bermanifestasi dalam tiga ranah utama:

- a) Ranah Teknologis: Penggunaan akun palsu dan bot untuk mendiskreditkan tokoh atau ajaran agama tertentu.

- b) Ranah Sosiologis: Munculnya ujaran kebencian (*hate speech*) yang mengatasnamakan pembelaan agama, padahal bertentangan dengan prinsip kesantunan Islam.
- c) Ranah Psikologis: Penyebaran konten yang memicu kecemasan dan radikalisme digital (*cyber-terrorism*).

Ketiga ranah ini bekerja secara simultan untuk menciptakan ketidakpastian informasi (disinformasi), yang jika dibiarkan, akan mengikis otoritas keagamaan yang kredibel dan menggantinya dengan narasi-narasi instan yang dangkal namun provokatif.

Problematika Etika Berinternet (Netiquette) dan Krisis Akhlak

Krisis ini berakar pada problematika sosiologis yang berkaitan erat dengan rendahnya etika berinternet atau *netiquette*. Terdapat kesenjangan yang lebar antara kemampuan operasional (kemahiran menggunakan perangkat) dengan kemampuan evaluatif (kemahiran memilah konten). Di wilayah perdesaan maupun urban, fenomena pengguna yang terjebak menjadi "korban sekaligus pelaku" penyebaran hoaks semakin meningkat (Rasiani et al., 2025). Mereka membagikan informasi palsu bukan karena niat jahat, melainkan karena kebingungan dalam membedakan antara informasi yang valid dan manipulatif.

Secara teologis, kondisi ini memicu krisis akhlak digital yang serius. Ketika fitnah dianggap sebagai kebenaran dan ujaran kebencian dianggap sebagai keberanian, nilai-nilai luhur Islam seperti *ash-shidqu* (kejujuran), *al-amanah* (integritas), dan *husnuzan* (berprasangka baik) mulai mengabur dari perilaku bermedia. Krisis akhlak ini tidak hanya memperlemah pemahaman agama secara substantif, tetapi juga mengancam ukhuwah islamiyah dan kohesi sosial nasional. Tanpa adanya restu etika digital yang kuat, teknologi yang seharusnya menjadi sarana *amar ma'ruf* justru berubah menjadi instrumen penyebar kemungkaran yang sistematis. "Integrasi antara nilai akidah dan akhlak menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi krisis moral di era digital yang penuh dengan arus disinformasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Najamudin & Hidayat (2025) dalam buku *Akidah Akhlak*, penguatan karakter yang toleran merupakan kunci utama untuk menolak pengaruh radikalisme dan hoaks yang seringkali masuk melalui celah media sosial. Hal ini sejalan dengan konsep integrasi akidah dan akhlak sebagai pondasi eksistensial bagi kehidupan yang bermakna, di mana setiap interaksi digital seorang Muslim harus mencerminkan integritas keimanan (Najamudin & Anwar, 2024). Peran pendidikan agama di tingkat perguruan tinggi menjadi sangat strategis dalam membekali mahasiswa agar mampu menyikapi kemajuan IPTEKS secara bijak, sehingga teknologi tidak sekadar menjadi alat teknis, melainkan sarana untuk menebar kemaslahatan sesuai prinsip-prinsip Islam (Najamudin & Hidayat, 2025). Dengan demikian, literasi digital yang berlandaskan pada nilai toleransi dan pemahaman agama yang

inklusif tidak hanya melindungi individu dari fitnah siber, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk (Najamudin & Anwar, 2024)."

Literasi Digital sebagai Wujud Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Dalam merespons tantangan disinformasi yang kian kompleks, Islam menempatkan kewajiban dakwah bukan sekadar sebagai anjuran, melainkan sebagai inti ajaran yang harus beradaptasi dengan zaman. Dakwah di era digital pada hakikatnya merupakan manifestasi modern dari prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ruang virtual kini menjadi medan juang baru di mana narasi kebenaran harus diproduksi secara masif untuk menekan dominasi narasi kebatilan.

Menurut Rasiani et al. (2025), dalam konteks virtual, *amar ma'ruf* diwujudkan melalui upaya memperkuat narasi kebaikan (*al-khoir*) dan konten-konten edukatif yang mencerahkan umat. Sebaliknya, *nahi munkar* digital dilakukan dengan membangun kontra-narasi yang cerdas terhadap konten negatif seperti hoaks, radikalisme, dan terorisme siber. Hal ini bukan sekadar aktivitas mengisi waktu luang, melainkan sebuah tanggung jawab teologis untuk menjaga ruang publik dari kerusakan informasi yang dapat memicu perpecahan bangsa.

Lebih jauh lagi, penegakan etika dan hukum terhadap kemungkaran digital seperti praktik judi *online*, penipuan berbasis data, dan penyebaran fitnah sejalan dengan prinsip *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan syariat). Rustandi (2023) menegaskan bahwa perlindungan terhadap lima unsur pokok manusia, khususnya perlindungan terhadap akal (*hifdz al-aql*), menjadi dasar mengapa melawan disinformasi adalah ibadah. Hoaks dan disinformasi adalah ancaman langsung terhadap kejernihan akal manusia; ia merusak daya nalar, memicu emosi buta, dan mengarahkan pada pengambilan keputusan yang salah. Oleh karena itu, studi ini menemukan bahwa implementasi dakwah digital yang paling efektif untuk melawan disinformasi adalah dengan meningkatkan literasi digital sebagai modal utama dalam strategi digitalisasi dakwah Islam kontemporer.

Implementasi Literasi Digital: Menanamkan Akhlak dan Keterampilan

Implementasi literasi digital dalam perspektif Islam tidak boleh terjebak pada sekadar kecakapan operasional atau teknis perangkat keras. Ia harus dipandang sebagai strategi komprehensif yang mengintegrasikan nilai-nilai langit dengan realitas bumi. Pendidikan Islam memegang peranan vital dalam membekali generasi muda dengan tiga pilar kompetensi digital: ***Kemampuan Berpikir Kritis (Critical Thinking)***

Membangun daya kritis adalah langkah awal filtrasi. Pengguna internet harus mampu menyaring informasi secara mandiri, mengenali bias media, memahami agenda *framing*, serta

mendeteksi ciri-ciri hoaks. Tanpa daya kritis, seorang Muslim akan mudah terombang-ambing oleh opini publik yang belum tentu benar.

Keterampilan Konseptual (Conceptual Skills)

Keterampilan ini mencakup kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, memproduksi, dan mendistribusikan media secara bijaksana. Literasi bukan hanya tentang mengonsumsi, tetapi tentang bagaimana memproduksi konten yang memiliki nilai manfaat tinggi (*manfaat*) dan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Kesadaran Etis dan Akhlak Digital (Digital Akhlak)

Strategi literasi media harus berakar pada nilai Islam, terutama prinsip *tabayyun* (verifikasi) dan kesadaran etis dalam berkomunikasi (Astutik & Yaqin, 2024). Akhlak digital memastikan bahwa seorang Muslim tetap menjaga lisan dan tulisannya meski di balik anonimitas dunia maya.

Implementasi praktis dari strategi ini tercermin dalam program-program pemberdayaan masyarakat, seperti "Pelatihan Konten Kreatif Desa Damai" yang digagas oleh Duta Damai Dunia Maya (D3M). Program ini menjadi *role model* karena tidak hanya menyentuh aspek *softskill* teknis mendesain konten, tetapi juga menanamkan *knowledge* (pengetahuan), *ability* (kemampuan), dan *attitude* (sikap) sebagai pengguna internet yang cerdas dan positif (Rustandi, 2023).

Tujuan akhir dari pelatihan semacam ini adalah transformasi dari pengguna pasif menjadi produsen pesan-pesan kreatif yang pro-perdamaian dan harmoni sosial. Dengan memberdayakan level personal, antarpersonal, hingga komunal, literasi digital menjadi senjata utama dalam menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* secara kolektif. Ini adalah wujud nyata tanggung jawab keumatan untuk memastikan bahwa teknologi digunakan demi meninggikan kalimat kebenaran dan menebar kedamaian di muka bumi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penyebaran hoaks dan disinformasi di era digital telah bertransformasi menjadi ancaman sistemik yang merongrong kohesi sosial dan integritas informasi masyarakat. Melalui mekanisme algoritma media sosial dan aplikasi pesan instan, informasi palsu mampu berpenetrasi secara cepat dan luas tanpa melalui proses filtrasi yang memadai. Kondisi ini diperparah oleh fenomena *post-truth*, di mana sentimen emosional dan opini subjektif sering kali mengesampingkan fakta objektif, sehingga menciptakan krisis kepercayaan dan degradasi akhlak sosial. Di kalangan generasi muda, tantangan ini tidak hanya mengaburkan realitas,

tetapi juga berpotensi memperlemah pemahaman agama jika tidak dibarengi dengan fondasi etika yang kokoh.

Dalam menghadapi realitas tersebut, literasi digital hadir sebagai solusi fundamental yang melampaui sekadar kemahiran teknis operasional. Literasi digital mencakup kemampuan kognitif untuk mencari, mengevaluasi secara kritis, dan mendistribusikan informasi secara bertanggung jawab. Dalam perspektif Islam, penguasaan literasi ini merupakan manifestasi modern dari kewajiban *tabayyun* (verifikasi) dan misi dakwah. Merespons kebohongan publik di ruang siber adalah bagian integral dari tanggung jawab keumatan untuk menegakkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Dengan menjaga kejernihan informasi, setiap Muslim sejatinya sedang menjalankan upaya perlindungan akal (*hifdz al-aql*) yang merupakan salah satu tujuan utama dari syariat Islam.

Implementasi strategi ini memerlukan sinergi antara peningkatan kecakapan teknis (*softskill*) dan penanaman kesadaran etis (*attitude*). Contoh nyata dari pendekatan holistik ini tercermin dalam program "Pelatihan Konten Kreatif Desa Damai" oleh Duta Damai Dunia Maya (D3M), yang membuktikan bahwa literasi digital yang efektif harus mencakup penguatan pengetahuan, kemampuan, dan sikap mental yang bijak. Kesadaran digital yang berlandaskan akhlakul karimah akan mengubah pengguna internet dari sekadar konsumen pasif menjadi agen perubahan yang aktif memproduksi narasi positif. Pada akhirnya, keterlibatan kolektif dalam mempromosikan perdamaian dan kebenaran di ruang virtual adalah kunci utama dalam membangun ekosistem digital yang sehat, jujur, dan beradab.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan: Bagi Influencer Muslim: Diharapkan untuk tidak hanya mengandalkan popularitas visual, tetapi juga memperdalam substansi intelektual dan menjaga integritas antara citra digital dengan realitas kehidupan nyata (integrasi akidah dan akhlak). Penerapan Verifikasi (Tabayyun): Setiap pendakwah dan pengguna media sosial hendaknya menjadikan *tabayyun* sebagai prosedur tetap sebelum menyebarkan informasi guna menangkal penyebaran hoaks dan fitnah siber. Penguatan Literasi Digital: Diperlukan upaya kolaboratif untuk membekali audiens dengan kemampuan literasi agar mereka mampu membedakan antara konten dakwah yang sah dengan narasi yang mengandung provokasi atau kepentingan ideologis tertentu. Moderasi dalam Berpendapat: Mengingat media sosial adalah ruang yang heterogen, para aktor dakwah disarankan untuk mengedepankan nilai toleransi dan semangat *ukhuwah* (persaudaraan) guna meminimalisir polarisasi dan konflik horisontal di ruang publik virtual

DAFTAR PUSTAKA

- Alhabsyi, M. (2017). *Komunikasi dakwah di era media sosial*. Penamadani.
- Astutik, I. D., & Yaqin, H. (2024). Optimalisasi strategi kolaborasi influencer dalam dakwah digital: Studi kasus Ustadz Hanan Attaki dalam meningkatkan kesadaran keagamaan. *Jurnal Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 20(2). <https://doi.org/10.14421/rejusta.v20i2.5734>
- Bawden, D. (2008). Origins and concepts of digital literacy. In C. Lankshear & M. Knobel (Eds.), *Digital literacies: Concepts, policies and practices* (pp. 17–32). Peter Lang.
- Bennett, W. L., & Livingston, S. (2021). The disinformation order: Disruptive communication and the decline of democratic institutions. *European Journal of Communication*, 36(2), 122–139. <https://doi.org/10.1177/02673231211012100>
- Freelon, D., & Wells, C. (2022). Disinformation as political communication. *Political Communication*, 39(2), 145–156. <https://doi.org/10.1080/10584609.2021.1914066>
- Guess, A. M., Lerner, M., Lyons, B., Montgomery, J. M., Nyhan, B., Reifler, J., & Sircar, N. (2023). A digital media literacy intervention increases discernment between mainstream and false news in the United States. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(5), e2217285120. <https://doi.org/10.1073/pnas.2217285120>
- Kozyreva, A., Lewandowsky, S., & Hertwig, R. (2022). Citizens versus the internet: Confronting digital challenges with cognitive tools. *Psychological Science in the Public Interest*, 23(2), 103–156. <https://doi.org/10.1177/15291006221108674>
- Najamudin, & Anwar, S. (2024a). *Integrasi akidah dan akhlak: Pondasi kuat untuk kehidupan bermakna*. Selat Media.
- Najamudin, & Anwar, S. (2024b). *Toleransi dalam perspektif agama, sosial, dan pendidikan*. Edu Publisher.
- Najamudin, & Hidayat, S. (2025a). *Akidah akhlak: Membangun akidah akhlak yang toleran: Menolak radikalisme di era modern*. Arta Media Nusantara.
- Najamudin, & Hidayat, S. (2025b). *Pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi*. Arta Media Nusantara.
- Nasriah, S., Islam, U., & Alaudin, N. (2021). Strategi dakwah dalam meminimalisir penyebaran informasi hoax di media sosial. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 41(2), 97–110. <https://doi.org/10.21580/jid.v41.2.8873>
- Noor, M. U. (2018). Penilaian kualitas informasi sebagai bentuk sikap tabayyun ketika menerima informasi di sosial media dan internet. *Jurnal Komunikasi*, 2, 33–40. <https://doi.org/10.17977/um008v2i12018p033>
- Politik, A. J., Humaniora, H., Muhamad, A., Nasoha, M., Atqiya, A. N., Thohir, H. K., Ramadhani, N. A., & Sabilaa, R. A. (2025). Etika komunikasi dalam Islam: Analisis terhadap konsep tabayyun dalam media sosial. Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta & Universitas Islam Negeri Raden Mas Surakarta.
- Rasiani, A., Sari, H. P., Wilis, E., & Setiawarni, U. (2025). Pendidikan Islam di era post-truth: Tantangan dan strategi literasi media bagi generasi muda. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 381–390. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i2.947>

- Rustandi, R. (2023). Implementasi dakwah digital melalui pelatihan konten kreatif Desa Damai. *TADBIR: Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(1), 1–28. <https://doi.org/10.24952/tadbir.v5i1.6479>
- Susilo, M. E., Afifi, S., & Yustitia, S. (2020). Hoax as a reflection on the low digital literacy in Indonesia. In *Proceedings of the Second International Conference on Social, Economy, Education and Humanity (ICoSEEH)* (pp. 165–174). <https://doi.org/10.5220/0009100201650174>
- Syihabudin, B., & Rahman, A. N. (2024). Strategi dakwah digital: Meningkatkan misi dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar melalui media sosial. *Al-Balagh: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1(1), 58–68.
- World Economic Forum. (2024). *Global risks report 2024* (19th ed.). World Economic Forum.